

BAB VII

Pengarustamaan Gender dalam Implementasi Peraturan Daerah serta

Efektivitas dan Hambatannya

6.1 Efektivitas pada Implementasi Peraturan Daerah Pengarustamaan Gender

Pada jawaban dari rumusan pertanyaan kedua ini, lebih lanjut akan diuraikan faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pengimplementasian Pengarustamaan Gender yang efektif dan tepat sasaran. Dinas pemberdayaan masyarakat, perlindungan perempuan dan anak serta keluarga berencana merupakan koordinator pengimplementasian Pengarustamaan Gender di daerah. Pada program ini kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan dengan mendukung prioritas pembangunan daerah, dan pencapaian kegiatan yang responsif gender.

Dalam proses pengimplementasian pembangunan daerah, kesetaraan gender merupakan salah satu tantangan terberat yang dihadapi karena tidak hanya bertumpu dalam produktivitas tetapi bertumpu juga pada manusia, supaya hasil daripada pembangunan dapat dinikmati atau dapat meningkatkan kesejahteraan hidup seluruh masyarakat. Dinas pemberdayaan masyarakat, perlindungan perempuan dan anak serta keluarga berencana merupakan koordinator pengimplementasian Pengarustamaan Gender di daerah.

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu kewajiban dalam menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam proses melaksanakan misi organisasi kepada pihak yang berwenang dalam hal menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPMP3AKB) Kota Tangerang Selatan. Penilaian capaian kinerja dikelompokkan sebagai berikut:

No.	Capaian Kinerja	Interpretasi
1	>100%	Melebihi/melampaui Target
2	= 100%	Sesuai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Selanjutnya dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan terkait sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam akuntabilitas kinerja dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2016-2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran

yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPMP3AKB) Kota Tangerang Selatan Tahun 2019.

Capaian indikator kinerja utama merupakan kegiatan manajemen yang membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja utamayang telah ditetapkan. Hal ini diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPMP3AKB) Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan pengukuran kinerja, diperoleh informasi terkait masing-masing indikator sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/ kegiatan yang direncanakan dapat berdaya guna.

Manfaat pengukuran kinerja untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui perbandingan capaian indikator kinerja utama (IKU), berikut hasil pengukuran dan target capaian atas indikator kinerja utama dan target capaianDinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPMP3AKB) Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 - 2021:

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Pemberdayaan Masyarakat,
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPMP3AKB)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 - 2019 Dibandingkan Dengan Target Akhir

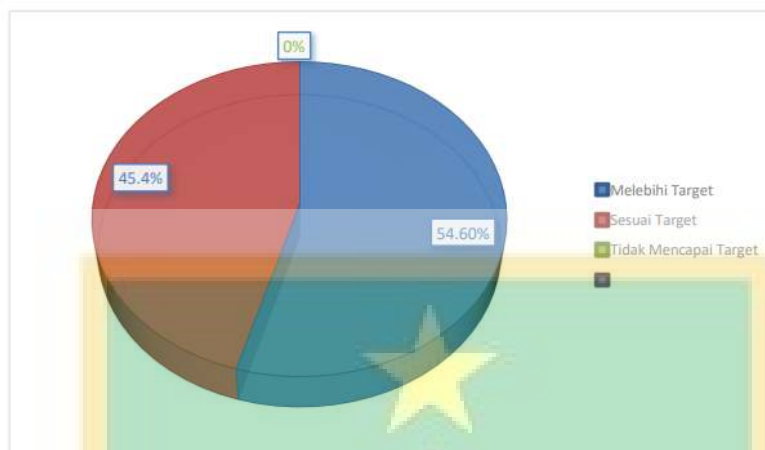
No	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2018			TAHUN 2019			2020	2021
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Target
1	Proporsi PUS yang istrinya dibawah 20 Tahun	Persentase	2,10%	0,89%	235%	2,0%	0,83%	240%	1,8%	1,8%
2	Unmet Need = $(\sum \text{PUS IAT} + \text{TIAL}) / \text{PUS 15-49 th} \times 100\%$	Persentase	6,40%	6,36%	100%	6,30%	6,30%	100%	6,20%	6,10%
3	Kesertaan ber- KB	Persentase	71%	75,33%	106%	71,20%	75,32%	105%	71,50%	71,50%
4	Persentase Anggota Tribina (BKB, BKR, BKL) yang Ber-KB	Persentase	89,90%	93,32%	103%	90,33%	90,84%	100%	92,66%	92,66%
5	Persentase Produk Unggulan UPPKS	Persentase	62%	67,65%	109%	65%	70,59%	108%	67%	70%
6	Jumlah Kelurahan Ramah Anak	Kelurahan	11	13	118%	14	16	114%	17	19
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	IPG dan IDG	Persentase	IPG 93,54-93,97	93	100%	IPG 93,59-94,16	93,16%	99,5%	IPG 93,64-94,35	IPG 93,68-94,53
			IDG 64,36-64,67	68	105%	IDG 64,46-64,87	70,72%	109%	IDG 64,56-65,70	IDG 64,66-65,27
9	Jumlah Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Dalam Pemberdayaan Masyarakat	Inovasi	7	7	100%	9	9	100%	11	11
10	Persentase Peran Serta Lembaga/ Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase	75%	98,31%	131%	77%	77%	100%	80%	85%

Sumber: Analisis, 2019

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
(DPMP3AKB) Kota Tangerang Selatan Tahun 2019

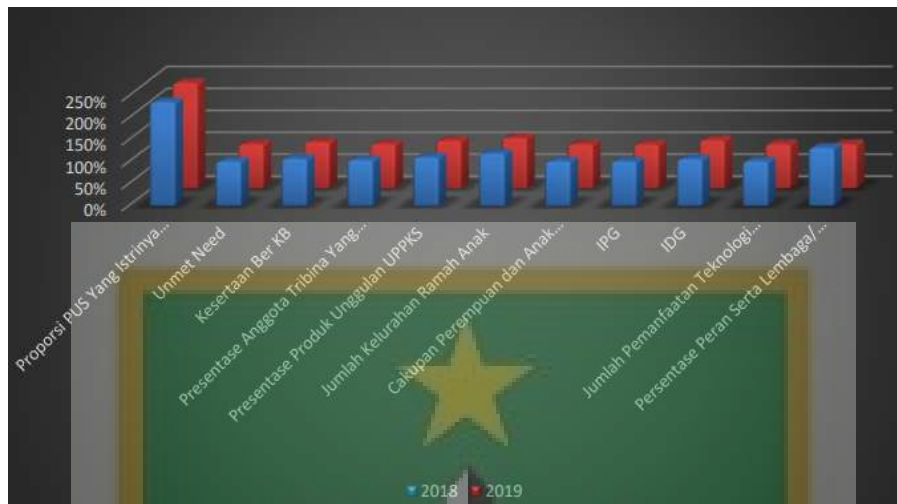
No	Indikator Kinerja	Jumlah	Capaian
1	Melebihi/ Melampaui Target	6	54.6 %
2	Sesuai Target	5	45.4 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0 %

Sumber: Analisis, 2019



Keberhasilan tersebut didasarkan pada capaian indikator kinerja utama pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPMP3AKB) Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 dengan rincian indikator kinerja utama dengan capaian melebihi target ditunjukkan dengan 6 (enam) indikator yaitu Proporsi PUS yang istrinya dibawah 20 tahun sebesar 240%, Kesertaan Ber-KB 105%, Persentase Presentase Produk Unggulan 108%, Jumlah kelurahan ramah anak 114% dan IDG 109%. Sementara capaian indikator kinerja utama yang sesuai dengan target atau mencapai 100% ditunjukkan dengan 5 (lima) indikator. Persentase Anggota Tribina (BKB, BKR, BKL) yang Ber-KB, cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas, Jumlah Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Persentase Peran Serta Lembaga/ Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan.

Perbandingan capaian kinerja pada setiap indikator kinerja utama pada tahun 2018 dan tahun 2019 sebagai berikut:



Berdasarkan grafik perbandingan diatas, diketahui bahwa terjadi beberapa peningkatan dan penurunan pencapaian jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Nilai capaian yang mengalami kenaikan yaitu pada Proporsi PUS yang Istrinya Dibawah 20 Tahun pada tahun 2018 mencapai 235% dan mengalami peningkatan di tahun 2019 menjadi 240% dan IDG tahun 2018 mencapai 105% di tahun 2019 mencapai 109%. Adapun untuk yang mengalami penurunan presentase yaitu Kesertaan Ber KB pada tahun 2018 106% di tahun 2019 105%, Presentase Anggota Tribina Yang Ber KB tahun 2018 mencapai nilai 103% sedangkan di tahun 2019 mencapai 100%, Presentase Produk Unggulan UPPKS pada tahun 2018 mencapai 109% mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 108%, Jumlah Kelurahan Ramah Anak tahun 2018 118% menjadi 114%, IPG pada tahun 2018 100% menjadi 99,5%, dan serta Persentase Peran Serta Lembaga/ Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan pada tahun

2018 131% dan pada tahun 2019 100%. Hal tersebut dikarenakan untuk mencapai target IPG dan IDG, indikator yang dibutuhkan merupakan ketercapaian indikator lintas sektoral (antar OPD).

Sasaran berdasarkan RPJMD Kota Tangerang Selatan yang merujuk pada Indikator Kinerja Utama DPMP3AKB adalah meningkatnya pengendalian jumlah penduduk, dengan indikator IKU Dinas DPMP3AKB adalah jumlah kelurahan dan kecamatan ramah anak serta cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas.

Adapun pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	TAHUN 2018		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk	Proporsi PUS yang istrinya dibawah 20 Tahun	Persentase	2.0%	0.83%	240%
	Unmet Need = $(\sum \text{PUS IAT} + \text{TIAL}) / \text{PUS 15-49 th} \times 100\%$	Persentase	6.3%	6.3%	100%
	Kesertaan ber- KB	Persentase	71.2%	75.32%	105%
	Persentase Anggota Tribina (BKB, BKR, BKL) yang Ber-KB	Persentase	90.33%	90.84%	100%
	Persentase Produk Unggulan UPPKS	Persentase	65%	70.59%	108%
Rata-rata					130.6

Sumber: Analisis, 2019

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa rata-rata capaian kinerja untuk sasaran “Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk” yang memiliki 5 indikator kinerja sebesar 130.6 %. Penjelasan setiap indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator kinerja Pertama: Proporsi PUS yang istrinya di bawah 20 tahun.

Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan). Target proporsi PUS di Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 adalah sebesar 2,0 % dan realisasinya sebesar 0.83% yang berarti capaiannya sebesar 240%.

Indikator kinerja kedua: Kesertaan ber-KB.

Keikutsertaan dalam ber KB menjadi penting dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, hal ini dikarenakan semakin banyak keluarga yang ikut KB maka semakin kecil laju pertumbuhan penduduk di Kota Tangerang Selatan. Dalam indikator kinerja kesertaan ber-KB, terdapat berbagai kegiatan yang dilakukan, seperti penyuluhan pada beberapa kelompok masyarakat. Dari target kesertaan ber-KB adalah sebanyak 71.2%, Realisasinya adalah sebanyak 75,32% dengan capaian 105%.

Indikator kinerja ketiga: Unmeet Need

Unmet need adalah kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kondisi ini mengisyaratkan keinginan pasangan usia subur (PUS) terhadap suatu jenis alat kontrasepsi yang tidak tersedia sehingga mereka mengambil keputusan tidak menggunakan alat atau metode kontrasepsi. Target unmeet need di Kota Tangerang Selatan adalah sebesar 6,3% dan realisasinya yaitu sebesar 6,3%, atau kata lainnya terdapat 100% kebutuhan PUS terhadap jenis alat kontrasepsi yang

tidak tersedia. Hal ini tentu menghambat keikutsertaan masyarakat pada program KB. Adapun kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan alat kontrasepsi adalah pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi serta pembinaan generasi berencana terhadap PUS.

Indikator kinerja keempat: Produk Unggulan UPPKS

UPPKS adalah wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sebagian besar anggotanya adalah peserta KB dari keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera yang aktif berusaha secara kelompok. Melalui usaha produktifnya, UPPKS diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Selain itu, interaksi antar anggota kelompok UPPKS diharapkan dapat pula meningkatkan kesertaan ber-KB anggota kelompok UPPKS dan masyarakat sekitar. Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan produk unggulan UPPKS adalah dengan pengumpulan dan sosialisasi daya mikro keluarga. Dengan dilakukannya berbagai kegiatan tersebut. Dari perhitungan diatas diketahui bahwa Produk Unggulan UPPKS di Kota Tangerang Selatan yaitu 70.59%.

Indikator kinerja kelima: persentase Anggota Tribina yang Ber-KB. Anggota tribina terdiri dari tiga kelompok, yaitu Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Lansia, dan Bina Keluarga Remaja. Program KB ditujukan pada anggota tribina tersebut dengan kegiatan penyuluhan dan pembinaan. Penyuluhan dilakukan kepada tiga kelompok tersebut di Kota Tangerang Selatan. Dari perhitungan diatas diketahui bahwa cakupan anggota tribina yang ber-KB di Kota Tangerang Selatan yaitu 90.33% yang mana target cakupan anggota tribina yang

ber-KB di Kota Tangerang Selatan yaitu 90,84%. Hal itu berarti capaian target cakupan anggota tribuna yang ber-KB di Kota Tangerang Selatan yaitu 100%.

Sasaran berdasarkan RPJMD Kota Tangerang Selatan yang merujuk pada DPMP3AKB adalah meningkatnya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG). Adapun pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya Pengarusutamaan Gender

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	TAHUN 2019		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya pengarusutamaan gender	Jumlah Kelurahan Ramah Anak	Kelurahan	14	16	114%
	cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas	Persentase	100%	100%	100%
	IPG dan IDG	Persentase	IPG 93,59-94,16% IDG 64,46-64,87%	IPG 93.16% IDG 70.72%	100%
	Jumlah Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Dalam Pemberdayaan Masyarakat	Inovasi	9	9	100%
	Persentase Peran Serta Lembaga/ Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase	77%	77%	100%
Rata-rata					102.8

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa rata-rata capaian kinerja untuk sasaran “Meningkatnya Pengarusutamaan Gender” yang memiliki 5 (lima) indikator kinerja sebesar 102.8%. Penjelasan setiap indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator kinerja Pertama: Jumlah kelurahan ramah anak

Indikator jumlah kelurahan dan kecamatan ramah anak merupakan indikator untuk mengukur seberapa besar untuk mengukur peningkatan kualitas perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak di Kota Tangerang Selatan.

Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, maka indikator kinerja jumlah kelurahan ramah anak di Kota Tangerang Selatan mencapai 16 Kelurahan dari target 14 kelurahan berdasarkan persentase mendapat 114%.

Indikator kinerja kedua: Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas

Indikator Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas merupakan indikator untuk mengukur seberapa besar untuk mengukur peningkatan kualitas perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak di Kota Tangerang Selatan.

Indikator kinerja Ketiga: IPG dan IDG

Target IPG di Kota Tangerang Selatan adalah sebesar 93,59-94,16% sedangkan realisasinya adalah sebesar 93.16% untuk target IDG mempunyai target 64,46-64,87 dan realisasi sebesar 70.72%. Dalam rangka peningkatan peran serta dan kesetaraan gender, dilakukan pendidikan dan pelatihan diantaranya pelatihan menjahit; edukasi mutu pangan local; pelatihan internet marketin dan pelatihan tata rias pengantin. Kegiatan tersebut bertujuan dalam rangka

memberikan keterampilan agar meningkatkan peran serta dan kesetaraan gender di masyarakat.

Indikator kinerja Keempat: Jumlah pemanfaatan TTG dalam Pemberdayaan Masyarakat

TTG adalah teknologi tepat guna. TTG merupakan salah satu cara atau pendekatan yang ampuh dalam upaya mendorong percepatan mewujudkan kemandirian masyarakat desa. Target dari Indikator Kinerja Jumlah Pemanfaatan TTG adalah sebanyak 9 inovasi sedangkan realisasinya adalah sebanyak 9 inovasi, maka Indikator Kinerja melebihi target yaitu 100% untuk mencapai sasaran tersebut.

Indikator kinerja Kelima: Persentase Peran Serta Lembaga/ Kelompok Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan

Pada indikator ini mempunyai target 77% realisasi mencapai 77% atau jika dipersentasekan sebesar 100%.

6.2 Hambatan pada Implementasi Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender

UUD 1945 memberikan kerataan hak kepada setiap warga negara Indonesia tanpa membeda-bedakan status gender, strata sosial, umur dan juga perbedaan lainya. Pada pembahasan ini pemerintah telah memberikan komitmen untuk menempatkan perempuan dan anak dengan persoalannya menjadi isu prioritas nasional, komitmen ini dapat dilihat di UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi

Terhadap Wanita (*convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Pada kenyataannya antara perempuan dan laki-laki masih terjadi penimpangan meskipun pada hakekatnya pembangunan bertujuan tanpa membedakan jenis kelamin. Data di kota Tangerang Selatan bahwa masih terjadi kesenjangan gender masih relatif tinggi di berbagai bidang pembangunan, selain itu pelaksanaan Pengarusutamaan Gender juga masih belum efektif meskipun pada pencapaian IPG Tangerang Selatan pada Tahun 2020 lebih tinggi dari IPG Indonesia, mencapai 93,58 dan 73,85 dari 91,06. Perempuan di Kota Tangerang Selatan pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berada di bawah rata-rata yaitu sebesar 62,46% dibandingkan dengan TPAK Provinsi Banten lebih rendah 1,99 pada angka 64,48%.

Secara umum Rencana Pembangunan Daerah 5 Tahun (RPJMD) tahun 2021-2026, Kota Tangerang Selatan sudah mencerminkan pencapaian terkait misi Wali Kota dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. Dimana kedudukan Pengarusutamaan Gender di dalam RPJMD diwujudkan ke dalam penggambaran strategi, kondisi, arah kebijakan kegiatan dan program yang memperhatikan akses dan kontrol peran serta partisipasi perempuan dan laki-laki secaraimbang. Yang diwujudkan dalam aspek perencanaan jangka menengah daerah.

Perhatian kepada, partisipasi, akses, kontrol dan peran anggota perempuan dan laki-laki pada setiap aspek, diwujudkan pada RPJMD aspek perencanaan jangka menengah di daerah yang terkait. Penyusunan pada perencanaan yang mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender selalu didasarkan dalam data pilah pada permasalahan yang terkait. Dalam penyajian permasalahan akan dilihat bagaimana kondisi dan prediksi selalu memperhatikan dan ditelaah pada data pilah gender dan issue gender yang berkembang terkait pada kondisi data daerah tersebut. Pengintegrasian Pengarusutamaan Gender melalui RPJMD merupakan salah satu cara yang strategis pada proses Pengarusutamaan Gender di daerah.

Dalam RPJMD fokus pada tiga isu atau kebijakan nasional terkait pengarusutamaan gender, yaitu: peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan dan peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Namun masih banyak terjadi kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Tangerang Selatan kian bertambah pada tahun ini naik 40% dibandingkan tahun lalu. Dan banyak yang beranggapan bahwa Pengarusutamaan Gender ini identik dengan kegiatan dan program khusus untuk perempuan, pemahaman yang salah terkait perbedaan jenis kelamin dan konsep gender ini menjadi hambatan yang cukup berpengaruh pada pengimplementasian Pengarusutamaan Gender. Tujuan dan prinsip Pengarusutamaan Gender yang lebih integral dan strategis ini terjadi kesalah pahaman pada kegiatan dan program untuk perempuan saja. Dalam pembahasan yang lebih praktis program dan kegiatan untuk perempuan tidak jadi

permasalahan, namun akan lebih baik jika penyusunan kegiatan dan program Pengarusutamaan Gender diharapkan lebih strategis dan berkelanjutan serta memiliki sasaran yang jelas dan berdaya ukur. Maka dari itu, diperlukan pemahaman dan kesadaran mengenai konsep gender dalam pengimplementasian Pengarusutamaan Gender yang terkait.

Dalam tahap pengimplementasian Pengarusutamaan Gender ini, peranan lembaga maupun instansi menjadi sangat penting, berkaitan dengan pendapat Razavi dan Miller (2006:13) yang berpendapat bahwa Pengarusutamaan Gender merupakan proses politis dan teknis, maka dibutuhkannya perubahan pada kultur organisasi. Pada Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan pemeran utama dalam konsep gender harus memberikan upaya pemahaman ke seluruh pimpinan maupun staf pada pemerintahan di daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang sudah ditetapkan.

